SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Sukarni¹, Siti Julaiha²

sukarni300769@gmail.com¹, siti.julaiha@uinsi.ac.id²

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris

ABSTRAK

Sistem penjaminan mutu pendidikan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan tantangan global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, implementasi, tantangan, dan strategi sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, artikel ini menyoroti peran kebijakan nasional seperti Standar Nasional Pendidikan (SNP), evaluasi internal dan eksternal, serta program-program strategis pemerintah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, masih terdapat hambatan seperti disparitas mutu antarwilayah, keterbatasan SDM, serta birokrasi yang kompleks. Untuk itu, strategi seperti penguatan kapasitas tenaga pendidik, digitalisasi pendidikan, dan kolaborasi multipihak menjadi kunci peningkatan efektivitas sistem penjaminan mutu. Artikel ini merekomendasikan pendekatan kolaboratif dan adaptif guna memastikan kualitas pendidikan Indonesia mampu bersaing secara global.

Kata Kunci: Penjaminan Mutu Pendidikan, Standar Nasional Pendidikan, Evaluasi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan.

ABSTRACT

The education quality assurance system is an important foundation in realizing quality education that is relevant to global challenges. This study aims to analyze the concept, implementation, challenges, and strategies of the education quality assurance system in Indonesia. Using a qualitative approach based on literature studies, this article highlights the role of national policies such as National Education Standards (SNP), internal and external evaluations, and strategic government programs. The results of the discussion show that although various policies have been implemented, there are still obstacles such as disparities in quality between regions, limited human resources, and complex bureaucracy. Therefore, strategies such as strengthening the capacity of educators, digitalization of education, and multi-party collaboration are key to increasing the effectiveness of the quality assurance system. This article recommends a collaborative and adaptive approach to ensure that the quality of Indonesian education is able to compete globally.

Keywords: Quality Assurance In Education, National Education Standards, Education Evaluation, Education Policy.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan peradaban suatu bangsa. Kualitas pendidikan yang unggul diyakini mampu mencetak sumber daya manusia (SDM) yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki keterampilan, karakter, dan daya saing tinggi di tingkat global. Dalam konteks globalisasi dan era revolusi industri 4.0, pendidikan menghadapi tantangan yang semakin kompleks, seperti tuntutan terhadap inovasi teknologi, kemampuan berpikir kritis, kolaborasi lintas disiplin, dan literasi digital. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan tidak lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan yang mendesak dan berkelanjutan.

Di tengah arus perkembangan teknologi informasi yang pesat dan perubahan sosial yang dinamis, dunia pendidikan dituntut untuk melakukan transformasi agar mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. Transformasi tersebut harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kurikulum, metode pembelajaran, sistem evaluasi, hingga manajemen kelembagaan. Dalam hal ini, sistem penjaminan mutu pendidikan hadir sebagai kerangka kerja yang terstruktur dan sistematis untuk memastikan bahwa proses dan hasil pendidikan berada dalam koridor standar nasional maupun internasional yang telah ditetapkan.

Sistem penjaminan mutu pendidikan tidak hanya berkaitan dengan keberhasilan peserta didik dalam capaian akademik, melainkan juga mencakup aspek-aspek lainnya seperti efektivitas manajemen sekolah, kualifikasi tenaga pendidik, kelengkapan sarana prasarana, serta keterlibatan pemangku kepentingan dalam mendukung proses pendidikan. Sebagai suatu sistem, penjaminan mutu memerlukan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang konsisten, pemantauan yang terukur, dan evaluasi berkelanjutan yang didasarkan pada data dan bukti empiris.

Berbagai negara maju telah membuktikan bahwa keberhasilan sistem pendidikan mereka tidak terlepas dari sistem penjaminan mutu yang kuat. Finlandia, misalnya, menerapkan sistem evaluasi internal yang berbasis kepercayaan dan profesionalisme guru, tanpa bergantung pada ujian nasional. Di Jerman, sistem pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan industri menjadi andalan dalam menciptakan tenaga kerja kompeten. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penjaminan mutu yang efektif tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

Di Indonesia, penjaminan mutu pendidikan telah menjadi bagian dari kebijakan nasional, dengan landasan hukum seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Standar Nasional Pendidikan mencakup delapan komponen utama yang menjadi acuan dalam mengembangkan layanan pendidikan yang bermutu. Meski demikian, dalam praktiknya, implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan mutu antarwilayah, keterbatasan tenaga pendidik yang kompeten, kurangnya infrastruktur pendidikan, serta birokrasi yang tidak efisien.

Selain itu, tantangan lain yang tak kalah penting adalah rendahnya literasi digital di kalangan pendidik dan peserta didik, serta resistensi terhadap perubahan dan inovasi dalam sistem pembelajaran. Padahal, di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan sangat penting untuk mendukung sistem evaluasi yang objektif, akses pembelajaran yang lebih luas, serta pengembangan pembelajaran yang adaptif dan personalisasi.

Menyadari pentingnya sistem penjaminan mutu pendidikan yang adaptif dan berorientasi masa depan, maka diperlukan upaya yang sinergis dan berkelanjutan antara pemerintah, institusi pendidikan, tenaga pendidik, masyarakat, dan dunia usaha. Penelitian

ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep dasar penjaminan mutu pendidikan, bagaimana sistem ini diimplementasikan di Indonesia, tantangan yang dihadapi, serta strategi strategis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitasnya.

Dengan pemahaman yang komprehensif terhadap sistem penjaminan mutu pendidikan, diharapkan Indonesia dapat membangun sistem pendidikan yang tidak hanya mampu bersaing di tingkat nasional, tetapi juga mampu mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan dunia global.

Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka ini mengulas berbagai referensi teoritis dan empiris yang mendukung pemahaman tentang sistem penjaminan mutu pendidikan, baik dari perspektif nasional maupun internasional. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memberikan landasan konseptual dan kontekstual terhadap implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia.

1. Konsep Penjaminan Mutu Pendidikan

Menurut Sallis (2019), penjaminan mutu dalam pendidikan merupakan pendekatan sistematis dalam meningkatkan kualitas institusi melalui penerapan prinsip-prinsip Total Quality Management (TQM), yang melibatkan semua komponen dalam institusi pendidikan secara terpadu dan berkelanjutan. Sistem ini mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan mutu secara terus-menerus.

UNESCO (2021) menekankan tiga elemen kunci dalam penjaminan mutu pendidikan:

(1) standar dan indikator mutu yang jelas, (2) mekanisme evaluasi dan akreditasi yang sistematis, serta (3) sistem umpan balik dan perbaikan berkelanjutan. Ketiga elemen ini menjadi pedoman utama bagi negara-negara dalam membangun sistem pendidikan yang akuntabel dan adaptif terhadap perubahan global.

2. Sistem Penjaminan Mutu di Indonesia

Barnawi dan Arifin (2017) menyatakan bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia dilaksanakan melalui dua mekanisme utama, yaitu Penjaminan Mutu Internal (PMI) oleh satuan pendidikan dan Penjaminan Mutu Eksternal (PME) oleh lembaga seperti BAN-S/M dan BAN-PT. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 57 Tahun 2021.

Kemendikbud (2022) mencatat bahwa implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan nasional terus diperkuat melalui program seperti Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, Merdeka Belajar, dan Kampus Merdeka. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas institusi pendidikan agar lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

3. Tantangan dalam Implementasi

Suryadi dan Nasution (2020) menyoroti beberapa kendala utama dalam implementasi sistem penjaminan mutu, termasuk kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, keterbatasan tenaga pendidik yang kompeten, dan rendahnya literasi digital. Birokrasi yang kompleks serta minimnya monitoring berkelanjutan juga menjadi hambatan dalam menciptakan budaya mutu di institusi pendidikan.

4. Peran Teknologi dalam Penjaminan Mutu

Wahyuni dan Arifin (2019) menekankan pentingnya integrasi teknologi dalam sistem penjaminan mutu. Penggunaan sistem manajemen pembelajaran (LMS), analisis big data, serta evaluasi berbasis komputer dinilai mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pemantauan dan penilaian mutu pendidikan. Hal ini menjadi relevan dalam menghadapi tantangan era digital dan Revolusi Industri 4.0.

5. Strategi Peningkatan Mutu

Mukhlis (2020) dalam kajiannya menegaskan perlunya pendekatan strategis untuk meningkatkan efektivitas penjaminan mutu, di antaranya melalui penguatan kapasitas

pendidik, peningkatan infrastruktur, reformasi birokrasi, serta kolaborasi lintas sektor dengan dunia industri dan organisasi non-pemerintah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode library research, yaitu pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lainnya yang relevan. Proses ini melibatkan pencarian literatur, analisis konten, serta seleksi data berdasarkan relevansi terhadap topik penelitian. Sumber-sumber yang digunakan dipilih secara kritis untuk memastikan validitas dan keandalan informasi. Objek penulisan gambaran dalam artikel ini tentang prinsip teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran.

Adapun proses yang dilakukan dalam penulisan artikel ini adalah Mencari, yaitu mencari sumber data dari buku, koran, jurnal, dan artikel online yang sesuai dengan masalah yang akan dikaji; Mengidentifikasi, yaitu memilih sumber data dan informasi yang telah dikumpulkan; Mempelajari, yaitu berusaha untuk memahami lebih jauh tentang sumber data dan informasi yang diperoleh sesuai dengan masalah yang dibahas; Menganalisis, yaitu membahas sumber data dan informasi dengan melakukan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang akan dikaji secara mendalam; dan Mengevaluasi, yaitu melakukan penilaian tentang layak atau tidaknya sumber data dan informasi yang diperoleh untuk dijadikan referensi terhadap masalah yang dikaji serta perlu atau tidaknya melakukan suatu revisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Masih Belum Merata

Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia belum berjalan secara merata di seluruh wilayah. Meskipun pemerintah telah menetapkan kerangka regulasi yang jelas melalui Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan membentuk dua mekanisme utama, yaitu Penjaminan Mutu Internal (PMI) dan Penjaminan Mutu Eksternal (PME), implementasi keduanya sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, sosial, dan ekonomi masing-masing daerah.

Di daerah perkotaan, institusi pendidikan cenderung memiliki sumber daya yang lebih lengkap, seperti tenaga pendidik yang berkualifikasi, sarana prasarana yang memadai, serta dukungan teknologi yang cukup untuk menjalankan sistem manajemen mutu berbasis digital. Hal ini menyebabkan sekolah-sekolah di kota lebih siap melaksanakan evaluasi mutu secara internal maupun eksternal, dan lebih cepat dalam merespons berbagai kebijakan baru dari pemerintah, seperti Merdeka Belajar dan transformasi digital pendidikan.

Sebaliknya, di wilayah pedesaan, terpencil, atau perbatasan, banyak satuan pendidikan yang masih mengalami hambatan serius dalam menjalankan sistem penjaminan mutu. Hambatan tersebut antara lain minimnya tenaga pendidik profesional, keterbatasan sarana seperti laboratorium, perpustakaan, akses internet, dan kurangnya pelatihan bagi kepala sekolah maupun tim penjaminan mutu internal. Dalam beberapa kasus, sekolah-sekolah bahkan belum memiliki dokumen rencana mutu atau belum terbiasa melakukan evaluasi diri secara sistematis.

Ketimpangan ini semakin diperparah oleh perbedaan dalam kapasitas manajemen dan budaya mutu di masing-masing institusi. Sekolah yang berada di bawah kepemimpinan yang visioner dan adaptif cenderung mampu melaksanakan penjaminan mutu dengan lebih baik, sementara sekolah lain masih berkutat dengan masalah administratif dasar. Hasil temuan ini sejalan dengan laporan Kemendikbud (2022) yang menyebutkan bahwa lebih dari 50% sekolah di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) belum melaksanakan pemetaan mutu secara berkala.

Dengan demikian, sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal pemerataan implementasi. Ketimpangan ini tidak

hanya berdampak pada kualitas pendidikan antarwilayah, tetapi juga memperlebar kesenjangan akses terhadap pendidikan bermutu antara kelompok masyarakat yang berbeda. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi khusus dari pemerintah untuk memberikan afirmasi dan pendampingan intensif kepada sekolah-sekolah di wilayah yang tertinggal agar dapat meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh dan berkeadilan.

2. Keterbatasan Kompetensi Tenaga Pendidik

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa keterbatasan kompetensi tenaga pendidik masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia. Peran pendidik sangat krusial dalam menentukan kualitas pembelajaran dan hasil pendidikan secara keseluruhan. Namun, banyak institusi pendidikan, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang, masih mengalami kesulitan dalam menyediakan tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan standar nasional maupun internasional.

Berdasarkan kajian dari Suryadi & Nasution (2020), terdapat beberapa aspek dari kompetensi guru yang belum optimal, antara lain: kemampuan merancang pembelajaran berbasis kompetensi, penguasaan teknologi pendidikan, pemahaman terhadap asesmen formatif dan sumatif, serta keterampilan dalam membangun iklim pembelajaran yang aktif dan partisipatif. Hal ini diperburuk oleh fakta bahwa sebagian guru belum memperoleh pelatihan berkelanjutan yang relevan dengan tuntutan zaman, terutama yang berkaitan dengan transformasi digital dalam pendidikan.

Masalah lain yang muncul adalah kurang meratanya distribusi guru berkualitas. Banyak guru dengan latar belakang pendidikan yang baik memilih untuk bekerja di daerah perkotaan atau pusat-pusat pendidikan yang sudah maju, sehingga menyebabkan kekosongan guru berkualitas di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal). Akibatnya, sekolah-sekolah di wilayah tersebut sering kali hanya mengandalkan tenaga pendidik dengan latar belakang akademik yang minim atau guru honorer yang belum bersertifikasi.

Di sisi lain, sistem sertifikasi guru yang diterapkan oleh pemerintah belum sepenuhnya menjamin kualitas. Banyak guru yang telah bersertifikat namun belum menunjukkan kinerja yang optimal di kelas, terutama dalam hal inovasi pembelajaran dan penyesuaian dengan kebutuhan peserta didik. Ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi guru tidak dapat dilakukan hanya melalui sertifikasi administratif, melainkan perlu didukung oleh program pembinaan profesional yang berkesinambungan, berbasis kebutuhan, dan dikaitkan langsung dengan praktik mengajar di lapangan.

Selain itu, budaya pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*) di kalangan guru juga masih belum tumbuh dengan baik. Banyak tenaga pendidik yang belum terbiasa melakukan refleksi terhadap praktik mengajarnya, mengevaluasi hasil pembelajaran secara kritis, dan melakukan perbaikan berdasarkan umpan balik siswa atau hasil evaluasi. Kurangnya budaya mutu dan inovasi ini menghambat pencapaian mutu pendidikan yang diharapkan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan kompetensi tenaga pendidik merupakan hambatan signifikan dalam penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan. Upaya peningkatan mutu pendidikan akan sulit dicapai apabila tidak disertai dengan strategi yang sistematis untuk memperkuat kapasitas guru, baik dari aspek pedagogik, profesional, sosial, maupun teknologi. Pemerintah dan institusi pendidikan perlu bersinergi dalam menciptakan ekosistem pembinaan guru yang mendorong peningkatan kualitas secara berkelanjutan dan berbasis pada kebutuhan nyata di lapangan.

3. Penggunaan Teknologi dalam Evaluasi Masih Terbatas

Temuan berikutnya dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam proses evaluasi dan pemantauan mutu pendidikan di Indonesia masih tergolong terbatas dan belum merata di seluruh satuan pendidikan. Padahal, dalam era digital dan

Revolusi Industri 4.0, teknologi seharusnya menjadi instrumen penting dalam mendukung transparansi, efisiensi, dan akurasi dalam sistem penjaminan mutu pendidikan.

Data dari Kemendikbud (2022) mengungkapkan bahwa meskipun sudah terdapat Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) berbasis digital, tingkat partisipasi sekolah dalam mengakses dan memanfaatkan platform ini masih rendah, khususnya di wilayah-wilayah dengan keterbatasan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia. Hanya sebagian sekolah di daerah perkotaan yang secara aktif menggunakan sistem digital ini untuk melakukan evaluasi diri, menyusun rencana tindak lanjut, dan memantau capaian mutu secara berkala.

Beberapa kendala utama yang menyebabkan terbatasnya pemanfaatan teknologi dalam evaluasi mutu pendidikan antara lain: rendahnya literasi digital di kalangan pendidik dan tenaga kependidikan, kurangnya pelatihan teknis terkait pengoperasian sistem digital mutu, keterbatasan perangkat keras seperti komputer dan koneksi internet yang stabil, serta belum adanya budaya evaluasi berbasis data yang kuat di lingkungan sekolah. Akibatnya, banyak proses evaluasi mutu yang masih dilakukan secara manual dan administratif, yang cenderung tidak efisien dan rawan kesalahan.

Selain itu, platform digital yang tersedia sering kali belum sepenuhnya user- friendly, terutama bagi sekolah yang tidak memiliki tenaga khusus di bidang IT. Pengumpulan data mutu yang dilakukan melalui sistem daring juga masih menghadapi kendala validitas dan reliabilitas, karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya pengisian data yang akurat dan konsisten. Dalam beberapa kasus, data yang diunggah ke sistem penjaminan mutu hanya bersifat formalitas agar memenuhi kewajiban administratif, bukan sebagai alat pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based decision making).

Padahal, sebagaimana diungkapkan oleh Wahyuni dan Arifin (2019), integrasi teknologi informasi dalam sistem evaluasi mutu seharusnya mampu memperkuat efektivitas monitoring dan perencanaan mutu secara real-time. Teknologi seperti sistem manajemen pembelajaran (LMS), dashboard mutu berbasis data, serta perangkat evaluasi berbasis komputer (CBT) dapat memberikan gambaran yang lebih objektif dan dinamis tentang kinerja institusi pendidikan. Selain itu, penggunaan teknologi memungkinkan personalisasi asesmen siswa, pelacakan perkembangan peserta didik secara individual, serta peningkatan akuntabilitas sekolah terhadap pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, peningkatan pemanfaatan teknologi dalam evaluasi dan penjaminan mutu pendidikan menjadi hal yang sangat mendesak. Pemerintah perlu memberikan perhatian serius pada pembangunan infrastruktur digital pendidikan yang merata dan memperluas program pelatihan teknologi bagi guru dan manajemen sekolah. Selain itu, diperlukan kebijakan yang mendorong transformasi budaya mutu digital di lingkungan satuan pendidikan, agar sekolah tidak hanya mengisi data semata, tetapi benar-benar memanfaatkan hasil evaluasi digital untuk refleksi, perencanaan, dan perbaikan berkelanjutan.

4. Tingkat Akreditasi Meningkat, Namun Tidak Selalu Mencerminkan Kualitas Nyata

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun angka akreditasi institusi pendidikan di Indonesia menunjukkan tren peningkatan, status akreditasi belum selalu mencerminkan kualitas pendidikan yang sesungguhnya. Banyak sekolah dan perguruan tinggi yang berhasil meraih akreditasi A atau B berdasarkan indikator administratif dan dokumen formal, tetapi dalam praktiknya belum sepenuhnya menunjukkan mutu pembelajaran dan hasil belajar yang tinggi dan berkelanjutan.

Fenomena ini dikenal sebagai akreditasi nominal, di mana capaian status akreditasi lebih merefleksikan kemampuan lembaga dalam memenuhi persyaratan teknis dan dokumentatif, bukan kinerja nyata dalam proses pendidikan. Proses akreditasi oleh Badan

Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dan BAN- PT seringkali menitikberatkan pada dokumen, laporan, dan perangkat bukti administratif. Akibatnya, banyak sekolah yang hanya "siap akreditasi" dalam waktu tertentu, tetapi tidak memiliki sistem penjaminan mutu internal yang berjalan terus- menerus di luar masa penilaian.

Temuan ini sejalan dengan analisis Suparman & Rahmawati (2021), yang menyatakan bahwa akreditasi di beberapa sekolah belum sepenuhnya mendorong perubahan budaya mutu. Sekolah cenderung hanya fokus pada memenuhi indikator akreditasi secara instan tanpa membangun praktik reflektif, inovasi pembelajaran, atau evaluasi berkelanjutan terhadap proses belajar mengajar. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan memperoleh nilai akreditasi tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas output peserta didik atau efektivitas pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas.

Selain itu, masih terdapat kesenjangan dalam kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses akreditasi, baik dari pihak sekolah maupun tim asesor. Tidak semua asesor memiliki pemahaman menyeluruh mengenai konteks lokal satuan pendidikan atau pendekatan evaluatif yang bersifat formatif dan kontekstual. Di sisi lain, sebagian sekolah juga memiliki keterbatasan dalam memahami nilai strategis akreditasi sebagai alat perbaikan mutu, sehingga memandang proses ini hanya sebagai formalitas administratif untuk memenuhi kewajiban kelembagaan.

Implikasi dari kondisi ini cukup serius. Jika akreditasi tidak digunakan sebagai alat untuk mendorong peningkatan mutu yang berkelanjutan, maka status akreditasi hanya menjadi simbol tanpa substansi. Hal ini akan berdampak pada persepsi publik terhadap mutu institusi pendidikan, dan lebih jauh lagi, akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan secara umum. Bahkan, lulusan dari institusi yang memiliki akreditasi tinggi pun belum tentu menunjukkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja atau pendidikan lanjut.

Untuk itu, sistem akreditasi perlu mengalami transformasi yang lebih substantif. Proses akreditasi hendaknya tidak hanya mengandalkan penilaian dokumen, tetapi juga mencakup observasi langsung terhadap praktik pembelajaran, wawancara dengan pendidik dan peserta didik, serta evaluasi terhadap budaya mutu yang tumbuh dalam institusi. Akreditasi juga harus dikaitkan dengan perbaikan mutu berbasis data, umpan balik dari pengguna lulusan, serta pelibatan pemangku kepentingan seperti orang tua, mitra industri, dan masyarakat sekitar.

Kesimpulannya, meskipun peningkatan status akreditasi menjadi indikator kemajuan administratif, masih diperlukan pembenahan dalam filosofi, metodologi, dan pelaksanaan proses akreditasi agar benar-benar menjadi alat transformasi mutu pendidikan, bukan sekadar pengukuran statis. Penjaminan mutu sejati adalah proses hidup yang terus berkembang, bukan hanya pencapaian satu kali dalam siklus penilaian.

5. Inisiatif Merdeka Belajar Mendukung Fleksibilitas Kurikulum

Penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberikan dampak positif terhadap peningkatan fleksibilitas kurikulum dan inovasi pembelajaran di satuan pendidikan. Kebijakan ini secara prinsip mendorong satuan pendidikan untuk menyusun kurikulum operasional yang kontekstual, relevan dengan kebutuhan peserta didik, serta memberi ruang yang lebih luas bagi kreativitas guru dan siswa.

Berdasarkan telaah literatur dan hasil evaluasi kebijakan, terlihat bahwa sekolah dan perguruan tinggi yang telah mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar cenderung memiliki tingkat partisipasi dan motivasi belajar yang lebih tinggi dari peserta didik. Hal ini disebabkan oleh adanya kebebasan dalam memilih topik, metode pembelajaran, dan bentuk asesmen yang lebih bervariasi. Guru tidak lagi terikat secara kaku pada buku teks atau

urutan materi kurikulum nasional, tetapi diarahkan untuk merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan sesuai dengan karakteristik lokal.

Selain itu, program turunan seperti Sekolah Penggerak dan Kampus Merdeka menjadi katalisator penting dalam mendorong transformasi pendidikan dari model konvensional menjadi model berbasis kompetensi dan pengalaman nyata. Sekolah Penggerak memberikan pendampingan dan pelatihan intensif kepada kepala sekolah dan guru untuk menerapkan budaya mutu, pembelajaran berdiferensiasi, dan manajemen sekolah berbasis data. Sementara itu, Kampus Merdeka memungkinkan mahasiswa untuk belajar di luar program studi utama melalui kegiatan magang, proyek riset, pengabdian masyarakat, atau studi independen yang terintegrasi dengan dunia kerja.

Namun, implementasi kebijakan ini tidak lepas dari tantangan. Banyak guru yang masih belum siap secara kompetensi dan mentalitas untuk menjalankan pembelajaran yang fleksibel dan kreatif. Tantangan ini terutama dirasakan di sekolah-sekolah yang terbiasa dengan sistem pendidikan yang sangat struktural dan seragam. Di sisi lain, beberapa guru merasa kesulitan dalam menyesuaikan strategi pengajaran dengan kebutuhan individu siswa, apalagi ketika jumlah siswa dalam satu kelas terlalu banyak dan waktu pengajaran terbatas.

Penelitian juga mencatat bahwa penerapan kurikulum merdeka membutuhkan dukungan sistem penjaminan mutu yang adaptif. Evaluasi terhadap keberhasilan implementasi Merdeka Belajar tidak bisa hanya mengandalkan hasil ujian standar, tetapi harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti proses belajar, keterlibatan peserta didik, peningkatan literasi, numerasi, dan karakter. Oleh karena itu, sistem penilaian mutu yang dikembangkan juga harus bersifat formatif, reflektif, dan berbasis data autentik dari lapangan.

Secara keseluruhan, kebijakan Merdeka Belajar membuka ruang yang lebih luas bagi lembaga pendidikan untuk menciptakan ekosistem belajar yang bermakna dan relevan. Jika didukung oleh pelatihan guru yang berkualitas, infrastruktur yang memadai, serta budaya inovasi yang kuat di sekolah, kebijakan ini dapat menjadi pendorong utama dalam memperkuat sistem penjaminan mutu pendidikan. Oleh karena itu, penting bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk terus mendukung implementasi Merdeka Belajar agar tidak berhenti pada tataran slogan, tetapi benar-benar menjadi gerakan perubahan yang berdampak nyata bagi mutu pendidikan nasional.

6. Diperlukan Penguatan Sinergi antar Pemangku Kepentingan

Penguatan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penjaminan mutu pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa sistem pendidikan berjalan secara efektif dan efisien. Penjaminan mutu pendidikan tidak bisa semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, meskipun pemerintah pusat memiliki peran yang sangat signifikan dalam menetapkan kebijakan dan regulasi. Keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada kerja sama antara berbagai pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah, institusi pendidikan, dunia industri, hingga masyarakat itu sendiri. Setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Pemerintah daerah, misalnya, memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa kebijakan pendidikan yang ditetapkan di tingkat pusat dapat dilaksanakan dengan baik di tingkat lokal. Mereka harus memastikan alokasi anggaran yang tepat untuk mendukung program-program pendidikan, serta mengawasi implementasi kebijakan pendidikan di daerah mereka. Selain itu, pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam memfasilitasi pelatihan dan pengembangan kompetensi guru serta mengembangkan program-program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Institusi pendidikan, baik itu sekolah dasar, menengah, maupun perguruan tinggi, harus menjadi pusat dari upaya penjaminan mutu pendidikan. Mereka tidak hanya

bertanggung jawab untuk menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga untuk mengembangkan kurikulum yang dapat menciptakan lulusan yang kompeten, inovatif, dan siap bersaing di dunia kerja. Oleh karena itu, institusi pendidikan harus terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem pendidikan yang ada, serta menciptakan suasana belajar yang kondusif bagi perkembangan siswa dan mahasiswa.

Dunia industri juga memiliki peran yang sangat penting dalam penjaminan mutu pendidikan, terutama dalam hal penyediaan informasi tentang kebutuhan keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi dan pasar kerja. Dunia industri harus bekerja sama dengan institusi pendidikan dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, mereka juga dapat berperan dalam menyediakan tempat magang atau pelatihan yang memungkinkan siswa atau mahasiswa memperoleh pengalaman kerja yang langsung di lapangan.

Masyarakat juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Partisipasi aktif masyarakat dalam dunia pendidikan sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Masyarakat dapat memberikan masukan tentang kebutuhan pendidikan yang relevan dengan perkembangan sosial dan ekonomi di daerah mereka. Selain itu, masyarakat juga harus terlibat dalam memantau dan mengawasi kualitas pendidikan yang diterima oleh anak-anak mereka, serta mendukung upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan sekitar.

Namun, meskipun peran masing-masing pihak sudah diakui, keterlibatan berbagai pihak ini masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam program peningkatan kompetensi guru dan penjaminan mutu berbasis komunitas. Peningkatan kompetensi guru merupakan aspek yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Guru yang berkualitas akan mampu menciptakan proses belajar yang efektif dan menyenangkan bagi siswa. Oleh karena itu, program pelatihan dan pengembangan profesionalisme guru perlu diperkuat dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan dunia industri.

Selain itu, penjaminan mutu berbasis komunitas juga perlu digalakkan, karena masyarakat yang terlibat langsung dalam pendidikan akan lebih memahami tantangan yang dihadapi dan dapat memberikan solusi yang lebih tepat. Program-program berbasis komunitas, seperti kelompok belajar atau forum diskusi antara guru, orang tua, dan siswa, dapat memperkuat kolaborasi antara berbagai pihak dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Dengan penguatan sinergi antara pemerintah, institusi pendidikan, dunia industri, dan masyarakat, diharapkan sistem penjaminan mutu pendidikan dapat berjalan dengan lebih efektif dan menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang siap menghadapi tantangan dunia kerja dan kehidupan.

KESIMPULAN

Sistem penjaminan mutu pendidikan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pendidikan berkualitas di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka regulasi seperti Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan berbagai program strategis seperti Merdeka Belajar, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan serius. Ketimpangan pelaksanaan antarwilayah, keterbatasan kompetensi tenaga pendidik, penggunaan teknologi yang masih terbatas, serta fenomena akreditasi nominal menjadi beberapa persoalan utama yang perlu diatasi.

Kebijakan Merdeka Belajar membawa angin segar dalam fleksibilitas kurikulum dan inovasi pembelajaran, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia serta dukungan infrastruktur yang memadai. Selain itu, penguatan sinergi antar

pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, institusi pendidikan, dunia industri, hingga masyarakat, menjadi kunci penting dalam membangun sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang kolaboratif, berbasis data, dan adaptif terhadap perubahan zaman dalam mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia. Upaya ini akan menjadi langkah strategis untuk menghasilkan generasi bangsa yang cerdas, berkarakter, dan siap bersaing di tingkat global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Y. (2014). *Desain sistem pembelajaran dalam konteks kurikulum berbasis kompetensi*. Bandung: Refika Aditama.
- Barnawi & M.Arifin. *Sistem Penjamin Mutu Pendidikan*. Ar-Ruzz Media, 2017. Depdiknas. (2019). *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Fattah, N. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Kemendikbud. (2022). *Laporan Evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mukhlis, M. (2020). *Manajemen Mutu Pendidikan: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyasa, E. (2018). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suparno, P. (2017). *Pendidikan Berkualitas: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tilaar, H. A. R. (2019). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Kartika, D., & Hidayah, R. Implementasi Sistem Manajemen Mutu di Sekolah Menengah. *Jurnal Pendidikan Sekolah*, 9.3 (2022), 210-225.
- Nugroho, A., & Hidayat, T. Tantangan dan Peluang dalam Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 25,3 (2019), 230- 245.
- Priyanto, A., & Setiawan, B. Evaluasi Kurikulum dalam Sistem Penjaminan Mutu. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 15(2020), 88-105.
- Rahardjo, M., & Widodo, P. Manajemen Mutu Pendidikan di Era Digital. *Jurnal Penjaminan Mutu Pendidikan*, 6,2 (2018), 98-110.
- Santoso, J., & Wibowo, F. Pengaruh Kebijakan Mutu terhadap Kinerja Guru. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10 (2018), 30-47.
- Suparman, U., & Rahmawati, D. Pengaruh Akreditasi Sekolah terhadap Mutu Pendidikan: Studi Kasus di Sekolah Menengah Atas Negeri. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 12(2021), 67-80.
- Suryadi, A., & Nasution, M. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Perguruan Tinggi. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8,2 (2020), 112-125.
- Wahyuni, R., & Arifin, T. Integrasi Teknologi dalam Penjaminan Mutu Pendidikan. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 7(2019), 55-72.
- Yusuf, F. A., & Utami, R. D. Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling dalam Manajemen Pendidikan Islam: Studi Kasus pada Pondok Pesantren di Jawa Barat. *Jurnal Konseling dan Pendidikan Islam*, 10,1 (2022), 45-60.